



**PELAYANAN PUBLIK**

**Kemenangan Kecil untuk Kota Yogyakarta**

Oleh **ERWIN EDHI PRASETYA**  
dan **IDHA SARASWATI**

**K**ota Yogyakarta dipersepsi-kan sebagai kota yang paling bersih dari korupsi. Setidaknya itulah hasil survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap 50 kota di Indonesia yang diadakan Transparency International Indonesia.

Dalam survei tersebut, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Yogyakarta mencapai 6,43 persen, atau yang tertinggi di banding 49 kota lain. Apa yang membuat persepsi responden begitu positif?

Sebagai perbandingan, persepsi terhadap Kota Yogyakarta ini berbeda jauh dengan persepsi terhadap Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelaku bisnis menilai praktik korupsi masih lazim terjadi di kota tersebut. Keseriusan pemerintah setempat untuk memberantas korupsi juga dipersepsi belum terlihat. Persepsi semacam itulah

yang membuat Kupang meraih indeks korupsi terendah, yakni 2,97 persen (*Kompas*, 22/1).

Jika mengacu pada persepsi pelaku bisnis, sejumlah pengusaha memang punya pendapat positif terhadap Yogyakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari sistem perizinan di kota ini.

Pengusaha di bidang properti Eko Sakti Wahyu, misalnya, menilai proses mengurus perizinan lebih cepat. Kondisi ini terjadi terutama setelah penerapan sistem perizinan terpadu di Yogyakarta. "Kalau dulu *ngurus* satu izin butuh waktu sampai empat minggu, sekarang asal desain bangunan sudah disetujui, prosesnya memang waktu satu minggu," tuturnya, Kamis (22/1).

Menurut Eko, yang biasa mengurus izin mendirikan bangunan ini, sistem terpadu juga memotong biaya yang harus ia keluarkan. Sistem semacam ini sangat mendukung pengusaha yang

dalam banyak hal memang ingin serba cepat. "Tidak ada lagi biaya siluman karena tarif perizinannya sudah ditentukan," ujarnya.

Terlepas dari kemudahan itu, Eko berharap agar izin lokasi benar-benar diawasi. Pada praktiknya saat ini, pemkot masih memberikan izin pembangunan di sejumlah lokasi yang sebenarnya tidak boleh dipakai untuk bangunan. "Sosialisasi tentang daerah mana yang boleh dan tidak itu harus ditingkatkan sehingga semua warga tahu," ucapnya.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar berpendapat hasil survei Transparency International Indonesia (TII) merupakan kemenangan kecil yang diraih kota pendidikan ini.

"Ini baru satu metode, yaitu survei berdasarkan persepsi

(Sambungan dari halaman A)

responden. Kalau yang digunakan metode lain, kita belum tahu hasilnya akan sama," ujarnya.

Jika menggunakan metode lain, misalnya riset langsung ke lapangan atau ke instansi, Zainal ragu hasilnya akan sama.

Persepsi bersih dari korupsi yang dinyatakan responden terhadap Yogyakarta, lanjutnya, sangat dipengaruhi keberadaan lembaga nonpemerintah (NGO) dan lembaga semipemerintah yang ada di Yogyakarta. Sebut saja Lembaga Ombudsman Daerah, Lembaga Ombudsman Swasta, dan Komisi Ombudsman Nasional, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat, ditambah pusat-pusat studi yang *concern* pada wilayah pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan bebas korupsi.

Lembaga-lembaga itu dinilai telah mampu mendorong pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menerapkan prinsip *good governance*. "Di Yogyakarta ada banyak LSM dan pusat studi di universitas. Gerakan masyarakat sipil yang kuat memberi kontribusi mengawal praktik penyelenggaraan peme-

(Bersambung ke hal D kol 1-2)

rintahan yang befsih," ujar Zainal.

Terpilihnya Yogyakarta sebagai kota paling bersih dari korupsi, seperti diungkapkan Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, dimungkinkan karena Keberadaan Dinas Perizinan yang merupakan pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

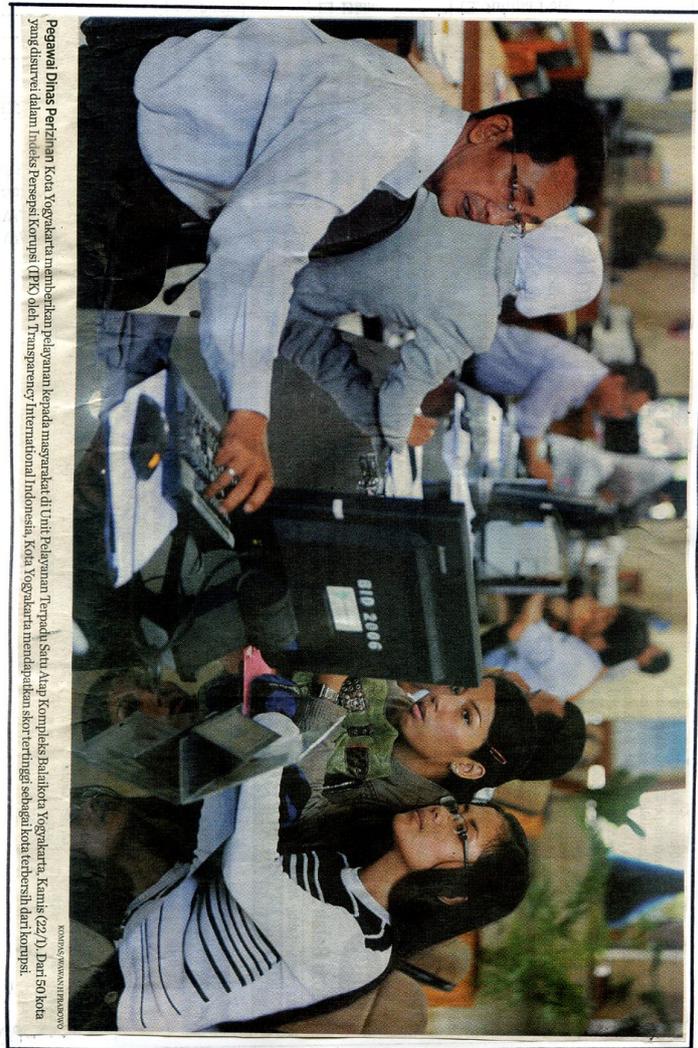
Menurut Zainal, keberadaan UPTSA ini merupakan sebuah terobosan yang diakui atau tidak lahir berkat dorongan masyarakat sipil. Meski begitu, faktor kepemimpinan tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Logikanya, sosok pemimpin yang antikorupsi dipastikan melahirkan kebijakan yang antikorupsi pula.

Terlepas dari keberhasilan Kota Yogyakarta, Zainal mengingatkan wilayah DIY belum sepenuhnya bebas korupsi. Ini bisa dengan mudah dilihat dari kasus-kasus korupsi yang sudah dan mulai terungkap, seperti kasus korupsi buku di Sleman, kasus Dana Purna Tugas di DPRD Kota Yogyakarta tahun 2004, dan kasus-kasus lainnya. "Ini kemenangan kecil. Kemenangan besar masih menunggu," ucapnya.

1. Wakil
2. Wakil
3. Sekretaris
4. Asisten

busan Kepada Yth :

INSTANSI	PERITA	SIFAT	TINDAK LANJUT
1. ...	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat ...	<input type="checkbox"/> ...



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan 2. Dharma Wanita Persatuan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005